

KINERJA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur)

Zulyatami Lestari^a, Afrah Junita^b, Iqlima Azhar^{c*}

^{abc} Falkutas Ekonomi, Universitas Samudra

^{c*}Corresponding author: iqlima_a@unsam.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of village facilitators, regulations, and the use of the Village Financial System (SISKEUDES) application on the performance of village governance in Sungai Raya District, East Aceh Regency. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 65 respondents, including village heads, secretaries, treasurers, village facilitators, and other village officials. The findings indicate that village facilitators, regulations, and the use of the SISKEUDES application significantly influence village governance performance, both partially and simultaneously. This suggests that optimizing the role of village facilitators, implementing effective regulations, and utilizing technology through the SISKEUDES application can enhance the efficiency and effectiveness of village governance. The study recommends improving the capacity of village facilitators, refining regulations, and providing intensive training on SISKEUDES usage for village officials to enhance transparency and accountability in village financial management. However, this research has several limitations, including regional coverage which is limited to Sungai Raya District, so the results cannot necessarily be generalized to other areas with different conditions. In addition, this research only focuses on three main variables, so other factors that have the potential to influence village government performance, such as human resource competency and community participation, have not been analyzed in depth. Therefore, it is hoped that further research can expand the regional coverage and add other relevant variables to obtain more comprehensive results.

Keywords: Village facilitators, regulations, SISKEUDES, village governance performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 65 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pendamping desa, dan aparatur desa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi peran pendamping desa, kebijakan regulasi yang tepat, serta penerapan teknologi melalui aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pendamping desa, penyempurnaan regulasi, serta pelatihan intensif terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi aparatur desa guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang terbatas hanya pada Kecamatan Sungai Raya, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama, sehingga faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, seperti kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah serta menambahkan variabel lain yang relevan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pendamping desa, regulasi, SISKEUDES, kinerja pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Peningkatan kinerja pemerintahan desa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar bagi desa dalam mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Namun, efektivitas tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi yang masih terbatas dalam administrasi keuangan desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa adalah dengan adanya pendamping desa yang berfungsi sebagai fasilitator dalam mendukung berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran pendamping desa sangat penting dalam mengoptimalkan fungsi aparatur desa dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Menurut penelitian Laha dan Dorohungi (2021), pendamping desa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Selain itu, regulasi yang jelas dan terstruktur juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Studi yang dilakukan oleh Ketsia et al. (2021) menunjukkan bahwa regulasi yang baik dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian Fitria dan Wibisono (2020), yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Di era digitalisasi, penggunaan teknologi juga berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menjadi alat yang membantu desa dalam mengelola keuangan secara lebih sistematis. Menurut penelitian Hasibuan et al. (2021), penggunaan SISKEUDES secara efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran desa. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa masih mengalami berbagai tantangan. Beberapa desa mengalami kendala dalam pemanfaatan teknologi keuangan desa serta penerapan regulasi yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nanda, S.T., Kaur Perencanaan Desa Labuhan Keude, yang mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, program pemberdayaan masyarakat di desanya terhenti, sehingga interaksi antara pemerintahan desa dan masyarakat menurun. Akibatnya, efektivitas tata kelola desa menjadi kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES terhadap kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep dan teori yang mendukung variabel penelitian, yaitu pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintahan desa. Beberapa teori utama yang digunakan adalah Teori *Goal Setting* (Locke & Latham, 1990) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989), serta konsep tentang kinerja pemerintahan desa.

Teori *Goal Setting*

Teori *Goal Setting* yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (1990) menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang spesifik, menantang, dan terstruktur dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu maupun organisasi. Teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana aparatur desa dapat bekerja lebih efektif jika memiliki tujuan yang jelas dan diarahkan oleh regulasi yang tepat serta bimbingan dari pendamping desa.

Pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu aparatur desa dalam menyusun tujuan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Pendamping desa yang baik akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur desa dalam mencapai target pembangunan. Selain itu, regulasi yang jelas berperan sebagai pedoman yang mengatur bagaimana pemerintahan desa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Palevi (2017) menunjukkan bahwa pendamping desa yang memahami peranannya sebagai fasilitator dapat membantu kepala desa dan perangkatnya dalam menyusun rencana kerja yang lebih efektif. Dengan demikian, teori *Goal Setting* menjadi dasar bagi penelitian ini dalam melihat bagaimana pendamping desa dan regulasi dapat membantu aparatur desa dalam menetapkan tujuan yang lebih jelas sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) dan digunakan untuk memahami bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi. Model ini menjelaskan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi adalah kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai sistem keuangan desa sangat dipengaruhi oleh persepsi aparatur desa terhadap kemudahan dan manfaatnya. Jika aplikasi SISKEUDES dianggap mudah digunakan dan memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi kerja, maka tingkat penerimaannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika aplikasi ini sulit dipahami atau tidak memberikan manfaat yang jelas, maka penggunaannya cenderung lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2021) menunjukkan bahwa adopsi aplikasi SISKEUDES di beberapa desa di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Namun, desa yang berhasil mengimplementasikan SISKEUDES dengan baik menunjukkan peningkatan dalam transparansi keuangan dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, TAM

digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.

Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintahan desa adalah tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Damapolii (2022) menyebutkan bahwa kinerja pemerintahan desa dapat diukur dari seberapa baik layanan publik diberikan, bagaimana keuangan dikelola, serta sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Menurut Lumempow et al. (2021), kinerja pemerintahan desa dapat ditingkatkan dengan adanya regulasi yang jelas, penggunaan teknologi yang mempermudah administrasi keuangan, serta pendampingan yang membantu aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap efektivitas pemerintahan desa. Maka, dalam penelitian ini, kinerja pemerintahan desa akan diukur berdasarkan seberapa besar pengaruh pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Pendamping Desa

Pendamping desa adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023, pendamping desa bertugas untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan kelembagaan desa, serta mendukung implementasi kebijakan desa.

Penelitian Laha dan Dorohungi (2021) menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya pendampingan yang baik, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada penelitian ini, pendamping desa ialah sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui bimbingan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Regulasi dalam Pemerintahan Desa

Regulasi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mekanisme kerja pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, dan layanan publik. Regulasi yang baik akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Wibisono (2020) menemukan bahwa regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, regulasi juga berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam penelitian ini,

regulasi dianalisis sebagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja pemerintahan desa, tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan.

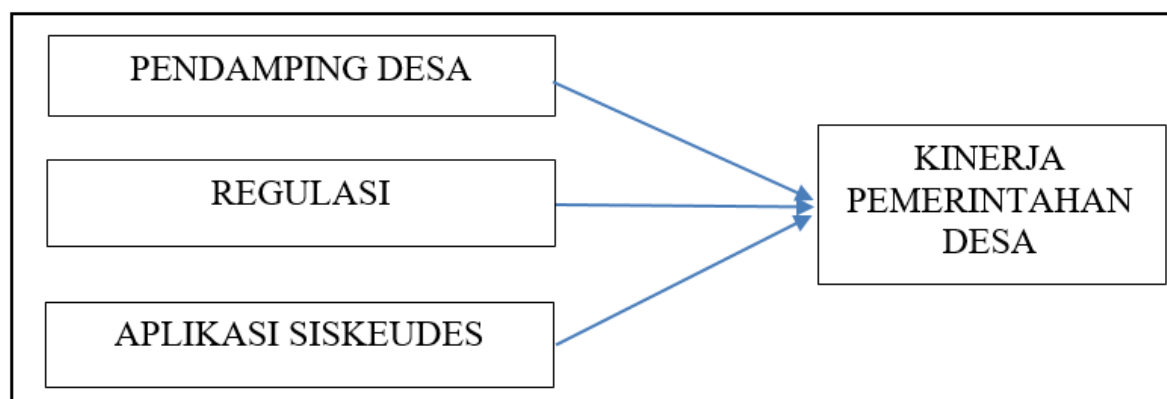
Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempermudah desa dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Aplikasi ini digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa.

Penelitian Faizah dan Sari (2022) menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES secara efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua desa dapat menggunakan SISKEUDES secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan. Dalam penelitian ini, penggunaan aplikasi SISKEUDES dianalisis sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi keuangan desa.

Model Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan Model Penelitian, maka kerangka berfikir dapat dijelaskan pada gambar 1



Gambar 1 Model Penelitian

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

Pengaruh Pendamping Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Teori Goal Setting yang dikemukakan oleh Locke dan Latham (1990) menyatakan bahwa penetapan tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja individu atau organisasi. pada Pemerintahan Desa, peran pendamping desa menjadi penting dalam membantu aparatur desa merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara optimal. Pendamping desa bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan motivator yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Laha dan Dorohungi (2021) menunjukkan bahwa pendamping desa berperan penting dalam membimbing aparatur desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan desa. Selain itu, penelitian Palevi (2017) menemukan bahwa peran pendamping desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja pemerintahan desa. lalu, penelitian Lubis et al. (2020) menegaskan bahwa desa yang memiliki pendamping desa yang aktif dan berkompeten menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa pendamping desa memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

H₁ : Pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa

Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Regulasi berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa agar berjalan dengan terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Teori Goal Setting menjelaskan bahwa aturan yang jelas akan meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, regulasi yang baik akan memastikan bahwa aparatur desa menjalankan tugasnya dengan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas yang baik.

Hasil penelitian Fitria dan Wibisono (2020) menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa, efektivitas layanan publik, serta efisiensi dalam administrasi desa. Selain itu, penelitian Ketsia et al. (2021) menemukan bahwa regulasi yang ketat terhadap pengelolaan keuangan desa berdampak signifikan pada peningkatan transparansi dan efektivitas pemerintahan desa.

Penelitian Irman et al. (2023), regulasi yang jelas dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sehingga meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan program desa. Studi lain yang dilakukan oleh Muis et al. (2015) menegaskan bahwa regulasi yang mendukung dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

H₂ : Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa

Pengaruh Penggunaan Aplikasi SISKEUDES terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Jika suatu teknologi dianggap mudah digunakan dan memberikan manfaat yang signifikan, maka penggunaannya akan lebih optimal dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam pemerintahan desa, aplikasi SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP untuk membantu desa dalam mengelola keuangan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Menurut penelitian Hasibuan et al. (2021), penggunaan aplikasi SISKEUDES yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan anggaran desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah dan Sari (2022) menunjukkan bahwa desa yang menggunakan SISKEUDES secara optimal memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dibandingkan desa yang masih menggunakan metode manual. Selain itu, penelitian Pratiwi dan Pravasanti (2020) menegaskan bahwa penggunaan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan anggaran desa.

H₃ : Penggunaan aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa

Pengaruh Pendamping Desa, Regulasi, dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Teori *Goal Setting* dan *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan bahwa kombinasi regulasi yang baik, pendampingan yang optimal, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, termasuk pemerintahan desa.

Menurut Ridwan (2019), desa yang memiliki regulasi yang jelas, didukung oleh peran pendamping desa yang aktif, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES yang optimal, memiliki tingkat efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak menerapkan ketiga faktor tersebut secara bersamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2019) menunjukkan bahwa integrasi antara regulasi yang baik, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, serta peran pendamping desa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta efektivitas tata kelola desa secara keseluruhan. Lebih lanjut, penelitian Ketsia et al. (2021) membuktikan bahwa regulasi, pengawasan kepala desa, serta peran pendamping desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

H₄ : Pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES terhadap kinerja pemerintahan desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menguji hipotesis berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik statistik.

Lokasi dan Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat variasi

dalam implementasi regulasi desa, peran pendamping desa, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kecamatan Sungai Raya yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pendamping Desa, perangkat desa.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

- Aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa.
- Aparatur desa yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam pemerintahan desa.
- Pendamping desa yang aktif dalam mendampingi desa di Kecamatan Sungai Raya.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan adalah 65 responden, dengan masing-masing desa diwakili oleh 5 orang aparatur desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Data Primer: Data yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan. Data Sekunder: Dokumen dan literatur yang mendukung penelitian ini, seperti peraturan pemerintah tentang desa, laporan keuangan desa, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Kuesioner tertutup dengan skala Likert (1-5), di mana responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kuesioner ini terdiri dari empat bagian yang mengukur variabel pendamping desa (X_1), regulasi (X_2), penggunaan aplikasi SISKEUDES (X_3), dan kinerja pemerintahan desa (Y).

Studi Kepustakaan

Menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa, pendamping desa, regulasi, dan aplikasi SISKEUDES.

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y = Kinerja Pemerintahan Desa

X_1 = Pendamping Desa

X_2 = Regulasi

X_3 = Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamatai hubungan antara satu variabel terikat/dependen dengan variable bebas atau independen (Ghozali, 2013). Hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9,417	4,760		-1,978	0,052
Pendamping Desa	0,359	0,093	0,397	3,865	0,000
Regulasi	0,304	0,104	0,268	2,907	0,005
Penggunaan Aplikasi SISKEUDES	0,846	0,222	0,348	3,810	0,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintahan Desa

Sumber: pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = -9,417 + 0,359 X_1 + 0,304 X_2 + 0,846 X_3$$

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah -9,417. Dapat diartikan apabila variabel independen dianggap tidak ada maka akan menurunkan variabel dependen (Kinerja Pemerintahan Desa) sebesar 9,417.
2. Nilai koefisien regresi variabel X_1 bernilai positif sebesar 0,359. Dapat diartikan apabila variabel independen Pendamping Desa meningkat maka akan meningkatkan variabel dependen (Kinerja Pemerintahan Desa) sebesar 0,359.
3. Nilai koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif sebesar 0,304. Dapat diartikan apabila variabel independen Regulasi meningkat maka akan meningkatkan variabel dependen (Kinerja Pemerintahan Desa) sebesar 0,304.
4. Nilai koefisien regresi variabel X_3 bernilai positif sebesar 0,846. Dapat diartikan apabila variabel independen Penggunaan aplikasi SISKEUDES meningkat maka akan meningkatkan variabel dependen (Kinerja Pemerintahan Desa) sebesar 0,846.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

1. Variabel Pendamping Desa memperoleh nilai t hitung sebesar 3,865 > dari t tabel yaitu 1,669. Dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka

dapat disimpulkan bahwa Pendamping Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa sehingga H_1 diterima.

2. Variabel Regulasi memperoleh nilai t hitung sebesar $2,907 >$ dari t tabel yaitu $1,669$. Dan tingkat signifikansi sebesar $0,005$. Karena nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa sehingga H_2 diterima.
3. Variabel Penggunaan Aplikasi SISKEUDes memperoleh nilai t hitung sebesar $3,810 >$ dari t tabel yaitu $1,669$. Dan tingkat signifikansi sebesar $0,000$. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Aplikasi SISKEUDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa sehingga H_3 diterima.

Hasil Uji F

Uji F yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (Pendamping desa, Regulasi, dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDes) secara simultan ataupun berama sama menerangkan variabel dependen (Kinerja Pemerintahan Desa). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	335,966	3	111,989	30,776	0,000 ^b
	Residual	221,972	61	3,639		
	Total	557,938	64			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintahan Desa

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Aplikasi SISKEUDes, Regulasi, Pendamping Desa

Fhitung sebesar $30,776$ dengan tingkat signifikansi $0,000 (<0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Pemerintah Desa) maka, H_4 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen yang dapat dilihat Adjusted R Square. Hasil uji Koefisien Determinasi pada tabel berikut3

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,776 ^a	0,602	0,583	1,90759

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Aplikasi SISKEUDes, Regulasi, Pendamping Desa

Nilai Adjust R Square sebesar 0,583 hal ini berarti variabel independen aa penelitian ini yaitu Pendamping Desa, Regulasi, dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 58,3% terhadap Kinerja Pemerintah Desa pada Kecamatan Sungai Raya. Sedangkan sisanya 41,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendamping Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori *Goal Setting* (Locke & Latham, 1990), yang menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan terstruktur akan meningkatkan motivasi serta efektivitas organisasi. Dalam konteks ini, pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu aparatur desa dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan desa dengan lebih efektif.

Penelitian Laha dan Dorohungi (2021) juga menunjukkan bahwa pendamping desa memainkan peran strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendamping desa tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mentor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa yang berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian Palevi (2017) menemukan bahwa desa yang memiliki pendamping desa aktif mengalami peningkatan dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberadaan pendamping desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa serta mempercepat implementasi program pembangunan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa pendamping desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui pendampingan, bimbingan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Regulasi yang diterapkan dengan baik terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Teori *Goal Setting* menyatakan bahwa aturan dan regulasi yang jelas memberikan pedoman bagi individu dan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, regulasi yang jelas dan tegas dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian Fitria dan Wibisono (2020) menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang baik juga membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih profesional dan tertib, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ketsia et al. (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi regulasi yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dana desa serta meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Lebih lanjut, penelitian Irman et al. (2023) menegaskan bahwa regulasi yang dirancang dengan baik memberikan batasan yang jelas bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan administratif dan meningkatkan

efektivitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa regulasi yang baik dan terstruktur berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi SISKEUDES terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989), yang menyatakan bahwa penerimaan suatu teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Dalam konteks ini, SISKEUDES memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih transparan dan efisien, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas pemerintahan desa.

Penelitian Hasibuan et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan anggaran desa. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Faizah dan Sari (2022) yang menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap kepatuhan desa dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, penelitian Pratiwi dan Pravasanti (2020) menegaskan bahwa desa yang aktif menggunakan SISKEUDES memiliki transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan dibandingkan desa yang masih menggunakan metode manual. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi seperti SISKEUDES dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pengaruh Pendamping Desa, Regulasi, dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa, regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil ini sejalan dengan Teori Goal Setting yang menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan pendampingan yang baik dalam meningkatkan efektivitas organisasi, serta *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi kerja suatu institusi.

Penelitian Ridwan (2019) menyatakan bahwa kombinasi kebijakan yang tepat, peran pendamping desa yang optimal, serta penggunaan teknologi yang efisien dapat menciptakan sistem tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini diperkuat oleh Hermanto (2019) yang menunjukkan bahwa integrasi antara regulasi yang baik, penggunaan teknologi, dan peran pendamping desa yang aktif dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Selain itu, penelitian Laya et al. (2021) menemukan bahwa desa yang memiliki regulasi yang jelas, didukung oleh pendamping desa yang kompeten, serta penerapan sistem teknologi dalam pengelolaan keuangan menunjukkan tingkat efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak menerapkan

ketiga faktor tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kombinasi pendamping desa, regulasi yang ketat, dan penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara signifikan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendamping Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Raya. Peran mereka dalam mendampingi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan. Selain itu, regulasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Regulasi yang jelas dan terstruktur menciptakan tata kelola yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, penggunaan aplikasi SISKEUDES turut berperan dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa, terutama dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan tepat waktu. Secara simultan, ketiga faktor tersebut—Pendamping Desa, Regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES—berkontribusi secara bersama-sama dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa, sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama, yaitu Pendamping Desa, Regulasi, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES, sehingga belum mempertimbangkan faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kinerja Pemerintahan Desa, seperti kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Kedua, cakupan penelitian yang terbatas pada Kecamatan Sungai Raya membuat hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara berpotensi memiliki bias subjektivitas dari responden, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran Pendamping Desa, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memaksimalkan penggunaan aplikasi SISKEUDES agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Di samping itu, instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan pelatihan lebih lanjut bagi aparatur desa terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES serta memastikan regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga kinerja pemerintahan dapat terus meningkat.

REFERENSI

- Armanda, R., & Hermanto, S. B. (2015). Analisis faktor penerimaan dan penggunaan teknologi dalam sistem informasi akuntansi dengan pendekatan TAM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(3).

- Damapolii, A., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Evaluasi kinerja perangkat desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Dharma, S. A. (2004). *Manajemen kinerja: Falsafah, teori dan penerapannya*. Jakarta: Ghava Media.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 748-757.
- Feblin, A., & Djuliar, C. R. (2021). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja. *KOLEGIAL*, 9(1), 60-72.
- Febrianti, M. M., & Priyadi, M. P. (2022). Implementasi good governance dan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(8).
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85-98.
- Haryani, & Syafruddin. (2010). Kepercayaan dan implementasi peraturan dan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Batang. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Universitas Diponegoro*.
- Hasibuan, R. A., Junita, A., & Azhar, I. (2021). Determinan efektivitas penggunaan sistem keuangan desa dengan peran pendamping desa sebagai pemoderasi (Studi pada desa se-Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(5), 316-326.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Irman, S., Khairunnisa, K., & Kamaluddin, K. (2023). *Regulasi hukum tata ruang*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Karanda, K. O., Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 2(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laya, K. A., Syaukat, Y., & Sarma, M. (2021). Pengaruh regulasi, pengawasan, kepala desa dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(1), 330-345.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting & task performance*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lubis, A. (2020). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation)*.

- Lumempow, V., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Maarif, S. D., & Idhom, A. M. (2021). Mengenal teori pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.
- Masrukhin, M. (2023). Rekonstruksi regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Robbins, S. P. (2011). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: Quantitative research approach. Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Wiguna, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta peran pendampingan desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali).
- Yuliani, S. (2022). Regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).